



WALI KOTA PONTIANAK

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2 / 938 / 2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, maka Pemerintah Kota Pontianak akan melaksanakan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana rincian terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KETENTUAN UMUM

1. Formasi yang tersedia adalah Formasi Umum dan Formasi Khusus;
2. Formasi khusus dimaksud adalah untuk Penyandang Disabilitas;
3. Proses Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak Formasi Tahun 2024 ini terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia;
4. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan secara kompetitif, adil, obyektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

C. ALOKASI FORMASI

Rumpun Jabatan Fungsional	Jumlah Formasi	Keterangan
Tenaga Kesehatan	61	Rincian Formasi CPNS Sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 (Terlampir pada Lampiran I)
Tenaga Teknis	327	

D. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar CPNS;
3. Batas usia sebagaimana yang dimaksud poin 2 (dua) dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu (dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau tidak diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Siswa/Siswi Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
11. Berkelakuan baik;
12. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi untuk 1 (satu) formasi jabatan dalam satu periode pendaftaran;
13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang Terakreditasi pada saat kelulusan, minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk seluruh pendaftar/pelamar;
14. Memiliki Ijazah SLTA/SMA/SMK/MA dengan nilai rata-rata minimal 75 (tujuh puluh lima) untuk skala penilaian 1 s/d 100 atau 7,5 (tujuh koma lima) untuk skala penilaian 1 s/d 10 pada formasi dengan kualifikasi pendidikan SLTA/SMA/SMK/MA;
15. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 24 Ayat d tertulis “dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PyB”
16. Penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan CPNS sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
17. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang terdapat pada SSCASN.

E. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

1. Surat Lamaran Asli yang ditujukan kepada Wali Kota Pontianak di Pontianak, diketik menggunakan komputer, ditanda tangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp.10.000 sebagaimana format terlampir, dengan melampirkan:
 - a. Asli Ijazah Perguruan Tinggi yang program studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah serta bukan merupakan ijazah sementara;
 - b. Asli Transkrip Nilai Akademik;
 - c. Surat pernyataan 5 Poin yang berisi tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba dan lain-lain yang ditanda tangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp.10.000 sebagaimana contoh terlampir;
 - d. Surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak ditanda tangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp.10.000 sebagaimana contoh terlampir;
 - e. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
2. Khusus formasi Jabatan Dokter, Perawat dan Apoteker melampirkan Asli ijazah profesi formasi jabatan;
3. Untuk rumpun jabatan tenaga kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
4. Untuk pelamar penyandang disabilitas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan **jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasnya**; dan
 - 2) Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** melalui **akun google drive** masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia pada website **bit.ly/LINKVIDEOPNS2024** untuk dilakukan pengecekan.
 - 3) Penyandang Disabilitas dapat mengisi jabatan dengan kriteria:
 - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
 - b. Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
 - c. Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
 - d. Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.
 - 4) Penyandang Disabilitas tidak dapat mengisi jabatan dengan kriteria:
 - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
 - b. Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
 - c. Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
 - d. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara dan kebakaran; dan/atau
 - e. Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.
 - 5) Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum yang sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan dalam Lampiran Pengumuman ini.

5. Khusus Formasi Medik Veteriner Ahli Pertama dan Paramedik Veteriner Terampil wajib melampirkan Surat Pernyataan bersedia ditugaskan di Rumah Potong Hewan (RPH Babi) yang ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000 sebagaimana contoh format terlampir;
6. Khusus Formasi Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama wajib melampirkan Surat Izin Praktek Psikolog (SIPP) atau Surat Sebutan Psikolog (SSP);
7. Khusus Formasi Polisi Pamong Praja wajib memiliki Tinggi Badan untuk Laki-laki 160cm dan Perempuan 155cm dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan/Pernyataan kesehatan yang mencakup Tinggi Badan dari Puskesmas Pemerintah sebagaimana contoh format terlampir.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi pengadaan CPNS yang dibutuhkan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada situs <https://pontianak.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pendaftaran pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pontianak diinformasikan lebih lanjut melalui situs <https://pontianak.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/> ;
3. Calon Pelamar Seleksi Pengadaan CPNS wajib memiliki Surat Elektronik (e-mail) yang masih aktif/berlaku;
4. Calon Pelamar Seleksi Pengadaan CPNS wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
5. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;
6. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
7. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2024, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2024, dan **Kartu** tersebut agar **disimpan** dengan baik;
8. Dokumen persyaratan diunggah melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran terdiri dari:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 tampak depan berlatar belakang merah, posisi portrait;
 - c. Swafoto/selfie sesuai ketentuan dalam SSCASN;
 - d. Ijazah asli Perguruan Tinggi yang program studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertera pada ijazah serta bukan merupakan ijazah sementara. Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi**;
 - e. Transkrip Nilai Asli. Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi**;
 - f. Apabila terjadi perubahan nomenklatur program studi, **wajib melampirkan surat keterangan dari Universitas/Perguruan Tinggi**;
 - g. **Surat lamaran ditujukan kepada Wali Kota Pontianak di Pontianak**, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000 sebagaimana contoh format terlampir;
 - h. **Surat Pernyataan** 5 Poin yang berisi tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000 sebagaimana contoh format terlampir;

- i. **Surat Pernyataan** bersedia untuk ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan tidak mengajukan usul pindah/mutasi kerja selama 10 tahun yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000 sebagaimana contoh format terlampir;
- j. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan;
- k. Dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf j diunggah dalam format sesuai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada aplikasi pendaftaran (SSCASN);
- l. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan **dokumen asli**, apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

G. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi direncanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan persyaratan yang ditentukan oleh panitia seleksi;
3. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

H. MASA SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada pengumuman;
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui SSCASN;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada pengumuman.

I. TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Nilai Ambang Batas Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Untuk Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Register (STR) bagi formasi tenaga kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

J. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CPNS

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Jadwal Pelaksanaan Seleksi diatas bersifat tentatif, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan (Perubahan akan disampaikan melalui website <https://pontianak.go.id/>)

K. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti adanya pemalsuan dokumen secara otomatis dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti dan akan diproses sesuai peraturan perundang – undangan;
2. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;

- c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
- e. Meninggal dunia;

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

- 3. Seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan keputusan Tim Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- 4. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 5. Pemerintah Kota Pontianak tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani/mempedulikan penawaran untuk mempermudah proses pengangkatan sebagai CPNS Tahun Anggaran 2024;
- 6. Kepada **pelamar wajib memantau** informasi terkini seputar pelaksanaan Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 melalui kanal-kanal resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran Pengadaan CPNS dapat diakses melalui portal atau situs <https://pontianak.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id/> serta dapat menghubungi panitia pengadaan CASN Pemerintah Kota Pontianak melalui <https://www.instagram.com/bkpsdmpontianak/>.

Pontianak, 18 Agustus 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh : Pj. WALI KOTA PONTIANAK, ANI SOFIAN 
---	---

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 800.1.2.2 / 938 / 2024

TANGGAL : 18 Agustus 2024

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
A.	TENAGA KESEHATAN		61	
1	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA
3	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIANTAN HILIR
4	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PERUMNAS II
5	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIANTAN HULU
6	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
7	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TELAGA BIRU

NO	JABATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
8	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
9	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS RADIOLOGI-RADIOLOGI INTERVENSIONAL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KARYA MULIA
11	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIANTAN HULU
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA
13	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIANTAN TENGAH
14	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PARIT H. HUSIN II
15	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK
16	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
17	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
18	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU

NO	JABATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
19	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK
20	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
21	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
23	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK
24	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK
25	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIANTAN HILIR
26	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PERUMNAS II
27	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BANJAR SERASAN
28	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PERUMNAS II
29	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM

NO	JABATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
30	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SAIGON
31	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIANTAN HULU
32	NUTRISIONIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KOM YOS SUDARSO
33	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
34	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK
35	PERAWAT AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT
36	PERAWAT AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA
37	PERAWAT AHLI PERTAMA	UMUM	5	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
38	PERAWAT AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM
39	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
40	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PERUMNAS I
41	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

NO	JABATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
42	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA
43	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIANTAN HULU
44	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PENUNJANG LAYANAN
45	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAL LIMA
46	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PARIT MAYOR
47	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TELAGA BIRU
48	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
49	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
50	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PENUNJANG LAYANAN
51	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAL LIMA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
B.	TENAGA TEKNIS			327	
1	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
2	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
3	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
4	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SUB BAGIAN TATA USAHA
5	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
6	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PENUNJANG LAYANAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
7	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN
8	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM
9	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
10	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN BIDANG PERDAGANGAN
11	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG MUTASI DAN PENGADAAN APARATUR
12	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SEKRETARIS - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK INSPEKTORAT SEKRETARIAT INSPEKTORAT SUB BAGIAN UMUM, APARATUR, EVALUASI DAN PELAPORAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
13	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN - D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
15	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
16	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
17	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
18	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
19	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI - D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
20	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
21	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
22	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
23	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
24	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
25	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
26	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
27	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
28	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
29	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
30	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
31	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU II
32	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
33	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU III
34	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU I
35	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PUBLIK - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN
36	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK INDUSTRI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS TENAGA KERJA BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
37	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUKUM - D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS TENAGA KERJA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
38	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BIDANG PETERNAKAN
39	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
40	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER - D-III SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
41	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III KESEHATAN HEWAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN BIDANG PETERNAKAN
42	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS SOSIAL BIDANG BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
43	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
44	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS SOSIAL BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
45	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PERTAMANAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERSAMPAHAN
46	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
47	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	5	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SUB BAGIAN TATA USAHA
48	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU
49	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN KEFARMASIAN
50	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SEKSI PENUNJANG LAYANAN
51	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PARIT H. HUSIN II
52	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAL TIGA
53	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI - S-1 HUKUM - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
54	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG KESATUAN BANGSA
55	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI
56	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR
57	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK BARAT SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK BARAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
58	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENDATAAN, PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENYULUHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
59	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
60	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
61	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK KOTA SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK KOTA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
62	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK UTARA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
63	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK BARAT SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK BARAT SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
64	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
65	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
66	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK UTARA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
67	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK SELATAN SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
68	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	UMUM	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK TIMUR SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
69	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK TIMUR SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
70	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKSI PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP
71	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK KOTA SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK KOTA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
72	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK SELATAN SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
73	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN
74	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
75	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT PUSAT ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN BAHASA
76	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
77	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
78	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	D-III TEKNIK SIPIL - D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG TATA RUANG DAN PENGENDALIAN
79	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
80	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN - S-1 PSIKOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS TENAGA KERJA BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
81	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERLENGKAPAN JALAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL
82	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK SIPIL	UMUM	6	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERUMAHAN
83	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK INDUSTRI	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
84	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU I
85	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU III
86	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU II
87	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
88	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
89	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TRANSPORTASI DARAT - D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN - D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TRANSPORTASI DARAT	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN SEKSI OPERASIONAL DAN PELAYANAN PELABUHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
90	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - D-IV TRANSPORTASI DARAT - D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF - S-1 TRANSPORTASI DARAT	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
91	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TRANSPORTASI DARAT - S-1 TEKNIK SIPIL - D-IV TRANSPORTASI DARAT - D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN - D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
92	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF - D-IV TRANSPORTASI DARAT - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TRANSPORTASI DARAT - D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN - S-1 TEKNIK MESIN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEKSI PENGELOLAAN PERPARKIRAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
93	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III KOMUNIKASI MASSA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SUB BAGIAN PROTOKOL
94	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PARIT H. HUSIN II
95	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSAT LABORATORIUM KESEHATAN SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSAT LABORATORIUM KESEHATAN
96	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KAMPUNG BALI
97	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KARYA MULIA
98	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III KEPERAWATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
99	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIANTAN HILIR
100	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
101	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIANTAN HULU
102	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM
103	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT
104	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KAMPUNG BANGKA
105	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAL LIMA
106	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PURNAMA
107	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SIANTAN TENGAH
108	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS ALIANYANG
109	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PERUMNAS I
110	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNG HULU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
111	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III FARMASI	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
112	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS GANG SEHAT
113	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SAIGON
114	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
115	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
116	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 EKONOMI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
117	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK SIPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR
118	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 KIMIA - S-1 BIOLOGI - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
119	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
120	PENYULUH BAHASA	S-1 BAHASA KOREA - S-1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB - S-1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG - S-1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT PUSAT ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN BAHASA
121	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 BIOLOGI - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG TATA LINGKUNGAN
122	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
123	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM
124	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG ANALISIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
125	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG ANALISIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
126	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III LLAJ	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERLENGKAPAN JALAN SEKSI REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
127	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN/LLASDP - D-III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR - D-III LLAJ	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN SEKSI OPERASIONAL DAN PELAYANAN PELABUHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
128	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III LLAJ - D-III ILMU TRANSPORTASI DARAT	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEKSI PENGELOLAAN PERPARKIRAN
129	PETUGAS TRANSPORTASI DARAT	D-III LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN/LLASDP - D-III LLAJ - D-III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
130	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM - S-1 MANAJEMEN	UMUM	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
131	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	UMUM	20	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
132	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	UMUM	10	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
133	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	UMUM	20	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
134	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	UMUM	20	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
135	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
136	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
137	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
138	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III MANAJEMEN	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
139	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
140	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
141	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
142	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK BARAT SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK BARAT SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
143	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
144	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
145	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
146	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
147	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
148	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD PONTIANAK UTARA SUB BAGIAN TATA USAHA
149	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN BIDANG PERLENGKAPAN JALAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL
150	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
151	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
152	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
153	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK INSPEKTORAT SEKRETARIAT INSPEKTORAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
154	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS - D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS - D-III SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
155	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
156	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
157	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK UTARA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
158	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK SELATAN SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
159	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
160	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS SOSIAL SEKRETARIAT DINAS SOSIAL
161	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
162	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK KOTA SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK KOTA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
163	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI
164	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK TIMUR SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
165	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH
166	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
167	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
168	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
169	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	2	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
170	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
171	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
172	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
173	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
174	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III SISTEM INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
175	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI - D-III SISTEM INFORMASI - D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH	LOKASI FORMASI
176	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KESEHATAN UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE BAGIAN UMUM SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
177	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA D-III TEKNIK INFORMATIKA	UMUM	4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
178	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG STATISTIK SEKTORAL



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

ANI SOFIAN 

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN PENGUMUMAN SELEKSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 800.1.2.2 / 938 / 2024
TANGGAL : 18 Agustus 2024

FORMAT SURAT LAMARAN

....., 2024

Hal : Lamaran untuk mengikuti Seleksi
Penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2024

Kepada
Yth. Wali Kota Pontianak

di-
Pontianak

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : *(Nama Lengkap + Gelar)*
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Jenis Kelamin : *Laki-Laki/Perempuan (pilih salah satu)*
Agama :
Status Perkawinan : *Kawin/Belum Kawin/Janda/Duda (pilih salah satu)*
Pendidikan / Jurusan :
Alamat : *Ditulis lengkap dengan mencantumkan Kota, Provinsi dan kode pos*
Alamat e-mail :
Nomor Telepon HP :
Nama Jabatan Yang Dilamar :
Lokasi Formasi :

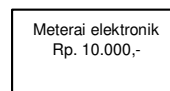
Mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan Bersama ini saya lampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Scan asli Ijazah Perguruan Tinggi;
2. Scan asli Transkrip Nilai Akademik;
3. Scan Foto warna berlatar merah;
4. Scan Asli Surat Pernyataan 5 Poin berisi tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain;
5. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk;
6. Scan Asli Surat Pernyataan bersedia untuk ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan tidak mengajukan usul pindah/mutasi kerja selama 10 (sepuluh) tahun;
7. (syarat lain sesuai ketentuan formasi jabatan).

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perkenannya saya ucapkan terima kasih

Hormat Saya,



(Nama Lengkap + Gelar)

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 800.1.2.2 / 938 / 2024
TANGGAL : 18 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
No. Telp./HP :
Nama Jabatan yang dilamar :
Unit Kerja Penempatan yang dilamar :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2024

Yang membuat pernyataan,

Meterai elektronik
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap + Gelar)

LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN
ANGGARAN 2024
NOMOR : 800.1.2.2 / 938 / 2024
TANGGAL : 18 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
No. Telp./HP :
Nama Jabatan yang dilamar :
Unit Kerja Penempatan yang dilamar :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bersedia ditempatkan di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
2. Selama bertugas saya tidak akan menuntut untuk pindah dengan alasan apapun minimal selama 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,..... 2024

Yang membuat pernyataan,

Meterai elektronik
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap + Gelar)

LAMPIRAN V
PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN
ANGGARAN 2024
NOMOR : 800.1.2.2 / 938 / 2024
TANGGAL : 18 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
No. Telp./HP :
Nama Jabatan yang dilamar :
Unit Kerja Penempatan yang dilamar :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk melaksanakan tugas terkait jabatan di Rumah Potong Hewan (RPH Babi) pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Bidang Peternakan sejak ditetapkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2024

Yang membuat pernyataan,

Meterai elektronik
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap + Gelar)

LAMPIRAN VI
PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN
ANGGARAN 2024
NOMOR : 800.1.2.2 / 938 / 2024
TANGGAL : 18 Agustus 2024

SURAT KETERANGAN/PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa:

Nama :
NIK :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :

Dinyatakan Sehat/Tidak Sehat dan sudah kami lakukan pengukuran tinggi badan dengan Tinggi Badan,.....

Demikian keterangan dan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 pada Jabatan Polisi Pamong Praja. Dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan hukum yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti keterangan dan pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2024

Yang memberikan keterangan dan pernyataan,

(TTD & CAP INSTANSI)

Nama.....

NIP.